

**STRATEGI INDONESIA MENJAGA KEAMANAN WILAYAH
PERBATASAN TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN
PADA TAHUN 2009-2014**

Oleh :

Akmal

Pembimbing : Pazli. S.IP. M.Si

E-mail : kmalse91@gmail.com

Bibliogarafi : 6 jurnal, 5 buku, 3 dokumen resmi, 15 artikel/website

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

This research describes how the Indonesian strategy to maintain security-related border areas of the South China Sea conflict in 2009-2014. South China Sea conflict until now have been not found a point of completion. Conflict continues to grow with the increasing military power among claimant states. Escalation of the conflict surely threaten security in the region. Although not a claimant states, Indonesia have a direct border with the South China Sea and has an interest in those waters, that is political, economic and security stability. Indonesia conducted a series of steps to secure its interests in the form of a decision as Indonesia in maintaining security strategy, especially directly adjacent to the South China Sea. This research used qualitative methods, and approaches realism. Using the analysis of the nation-state level and using the theory of security strategy. Results of this research is the increasing capability of Indonesian military capability enhancement through minimum essential force (MEF) 2010-2014. The addition of the number of troops and military fleets in Natuna as a form of Indonesia's readiness to face any possibility of conflict. Then preventive diplomacy by Indonesia went well for reducing conflict among the claimant states. To increased border management by negotiating border lines with neighboring countries and increase activity in the border region in the form of oil exploration in the waters of Natuna as a form of existence Indonesia in that area.

keyword : conflict, diplomacy, security, south china sea

Pendahuluan

Menelusuri suatu konflik yang ada dalam hubungan internasional merupakan kajian yang sangat panjang dengan batasan yang tak terhingga. Setelah lahirnya konsep negara-bangsa

modern, penyebab konflik mulai berubah yang sebelumnya didominasi oleh perbedaan agama. Negara-bangsa yang ada di dunia mulai merubah arah kecendrungan untuk menentukan hakekat bangsanya sendiri sebagai

bangsa yang mandiri. Maka timbulah kepentingan-kepentingan baru dari antara negara bangsa seperti kepentingan politik, ideologi, ekonomi, pertahanan keamanan dan sosial budaya dengan sasarannya adalah hegemoni.

Salah satu konflik yang terus berkembang dan semakin meningkat ketegangannya adalah di kawasan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan laut yang memiliki luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Luas tersebut merupakan 39% dari total luas wilayah laut di Asia Tenggara yang berjumlah lebih kurang 8,9 juta kilometer persegi. Laut Cina Selatan merupakan 2,5 % dari Luas laut dunia secara keseluruhan.¹ Membentang dari selat Malaka sampai ke selat Taiwan, dikelilingi oleh negara-negara ASEAN, di utara berbatasan dengan Tiongkok dan Taiwan, barat berbatasan dengan Vietnam Kamboja dan Thailand, Selatan berbatasan dengan Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia dan Singapura, di timur berbatasan dengan Filipina.

Klaim pertama kali di Laut Cina Selatan terjadi pada tahun 1947 yang dilakukan oleh Tiongkok² yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dengan menerbitkan peta yang memberi tanda sembilan garis putus-putus di seputar wilayah perairan itu. Hingga sekarang masih terjadi pertikaian atau saling klaim antara negara yang mengaku memiliki dasar kepemilikan berdasarkan batas wilayah laut atau

perairan, seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam.³

Klaim perbatasan yang tumpang tindih masih terus berlangsung di wilayah Laut Cina Selatan dan menjadi perdebatan antara beberapa negara di kawasan ASEAN. Terdapat dua hal yang merupakan sumber dari konflik Laut Cina Selatan, *pertama* adalah Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh beberapa Negara di sekitar perairan tersebut. UNCLOS mengatur tentang perairan internal, perairan kepulauan, perairan teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan laut lepas.⁴ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, negara-negara pengklaim (*claimant state*) menggunakan aturan konvensi untuk memperpanjang yurisdiksi kedaulatan secara unilateral dan membenarkan klaim mereka di laut itu. Hal inilah yang di antaranya memicu sengketa klaim wilayah maritim di Laut Cina Selatan. Negara yang menggunakan UNCLOS dalam pengklaimannya adalah Malaysia, Brunai Darussalam dan Filipina

Kedua, klaim terhadap Laut Cina Selatan yaitu klaim historis penemuan dan pendudukan wilayah itu. Tiongkok (bersama Taiwan) merupakan negara utama yang mendasarkan klaimnya pada alasan historis penemuan dan pendudukan. Vietnam adalah negara berikutnya yang menetapkan klaim di Laut Cina Selatan

¹Gao Zhiguo, "South China Sea: Turning Suspicion into Mutual Understanding and Cooperation", dalam Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, dan Chin Kin Wah (eds.), ASEAN-China Relations: Realities and Prospects (Singapura: ISEAS Publishing, 2005), hlm. 330

² Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014, secara resmi pemerintah Indonesia mengganti Republik Rakyat Cina menjadi Republik Rakyat Tiongkok

³ Singapura Desak Cina Jelaskan Klaim <http://internasional.kompas.com/read/2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.Cina.Jelaskan>. Klaim Diakses tanggal 27 November 2014

⁴ "Dinamika di Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap Indonesia" diakses dari <http://www.fkpmaritim.org/dinamika-di-laut-cina-selatan-dan-implikasinya-terhadap-indonesia/> diunduh pada 10 Desember 2014

berdasarkan alasan historis penemuan dan pendudukan.⁵

Terdapat beberapa hal yang ditenggarai merupakan penyebab masih berlangsungnya konflik di kawasan tersebut. *Pertama*. Beberapa peneliti mengklaim bahwasanya kawasan laut Cina Selatan memiliki kekayaan sumberdaya alam (SDA).⁶ Pada tahun 1968 ditemukan cadangan minyak bumi yang menaikkan nilai Laut Cina Selatan. Cadangan minyak potensial di kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan mencapai 105 milyar barrel dan diseluruh Laut Cina Selatan sebanyak 213 Milyar barrel. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60-70% hidrokarbon di kawasan tersebut merupakan gas alam.⁷ Badan Informasi Energi AS memperkirakan cadangan gas alam dan minyak di Laut Cina Selatan merupakan terbanyak ketujuh di dunia. Kawasan tersebut diperkirakan memiliki 190 triliun kaki gas alam. Badan independen itu juga menaksir ada 11 miliar barel minyak tersembunyi di laut Cina Selatan.⁸

Kedua, letak yang strategis selalu menjadi primadona bagi negara lain untuk memilikinya. Letak laut Cina Selatan yang menghubungkan dua Samudra telah menjadi jalur perlintasan favorit kapal-kapal internasional. Menghubungkan perniagaan dari Eropa, Timur tengah, Australia menuju Jepang, Korea, Tiongkok dan negara lainnya

yang melewati Selat malaka. Amerika Serikat juga menyatakan kepentingannya atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan.⁹

Ketiga, dalam sepuluh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia berkembang dengan pesat, terutama Tiongkok, India dan negara-negara Asia Tenggara, sedangkan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat mengalami penurunan. Untuk mengamankan kepentingan keamanan energi (*energy security*)-nya baik Amerika Serikat maupun Tiongkok berupaya menguasai kawasan laut Cina Selatan.¹⁰

Indonesia yang tidak ikut mengklaim wilayah di perairan tersebut, namun mulai “terganggu” oleh klaim sepihak Tiongkok yang mengeluarkan peta “U” atau dikenal dengan *Nine Dash Line* yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1993.¹¹ Pada tahun 2009 negeri “Tirai Bambu” tersebut kembali mengeluarkan peta terbaru mengenai klaimnya dilaut Cina Selatan. Tiongkok memasukan perairan Natuna kedalam peta klaimnya. Permasalahan bukan hanya terfokus kepada pulau Spratly dan Paracel saja, namun berimbas pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dengan terganggunya utara kepulauan Natuna dalam sengketa Laut Cina Selatan akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi, karena Indonesia memiliki eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi di kawasan ZEE tersebut.

⁵ fkpmaritim., *ibid.*,

⁶ Rizki Roza, Poltak Partogi N., Simela V.M 2013. “Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan” P3DI Setjen DPR Republik Indonesiadan Azza Grafika. Jakarta . hlm xi

⁷ Simela Victor Muhamad. "Kepentingan China dan Posisi Asean dalam Sengketa laut China Selatan". Jurnal info Singkat Hub. Internasional vol. IV, No 08/II/P3DI/April/2012 hlm. 6

⁸ EIA <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS> 6April 2015

⁹ Rizki Roza., *log.cit.*, hlm.,xi

¹⁰ Rizki Roza, Poltak Partogi. *ibid.*, hal xi

¹¹ Erwin Kurnia N.M. “Pengaruh Konfik Laut Cina Selatan Terhadap Sistem Pertahanan Negara Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta 2014, hal. 8 di unduh dari https://www.academia.edu/7289711/Pengaruh_Konflik_Laut_China_Selatan_Terhadap_Sistem_Pertahanan_Negara diakses pada tanggal 2 Desember 2014

Kemudian, konflik di Laut Cina Selatan sangat rawan akan konfrontasi perang, terutama ketika Tiongkok melakukan modernisasi alutsistanya yang diikuti oleh negara lain di sekitar kawasan tersebut untuk mengantisipasi semakin besarnya kekuatan Tiongkok.¹² Kondisi seperti ini tentu mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI. Frederick L. Schuman mengatakan peranan pemerintah dalam sistem hubungan internasional bersikap mencari aman saja sambil dapat melakukan rilis di dalam lingkaran kekuasaan dan memandang *power* itu ada pada negara tetangganya yang dijadikan sebagai suatu “alarm”.¹³

Pernyataan Presiden SBY terkait konflik Laut Cina Selatan;

“Indonesia terus mewaspadai situasi keamanan di sekitar Laut Cina Selatan yang sering dijadikan sengketa oleh beberapa negara di kawasan itu. Kawasan Laut Cina Selatan adalah salah satu sumber konflik, sehingga konflik di kawasan itu akan berpengaruh pada kondisi keamanan dan ekonomi karena merupakan jalur lintas ekonomi internasional, yang akan berimbas kepada Indonesia karena kawasan tersebut dekat dengan Zona Ekonomi Eksklusif kita”.¹⁴

Pernyataan diatas menjelaskan sikap Indonesia yang terus mewaspadai situasi konflik laut Cina Selatan. Perkembangan konflik kearah yang buruk (perang) atau damai akan

berimbas kepada Indonesia. Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalam sengketa perebutan wilayah di Laut Cina Selatan. Akan tetapi, terancamnya stabilitas regional didalam tubuh ASEAN karena konflik di kawasan Laut Cina Selatan, akan berdampak juga pada ketidaksesuaian terhadap kredibilitas dan postur keamanan ASEAN yang akan berpengaruh bagi Indonesia.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma realis yang menjadikan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional, *monolith*, dan memperhitungkan *cost and benefit* dari setiap tindakannya. Tingkat dan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara-bangsa (*nation-state*). Tingkat analisa ini lebih fokus pada apa yang dilakukan oleh negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional (*national interest*).

Teori yang relevan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah teori Teori Strategi Keamanan. Perancangan strategi tidak didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan atau hal-hal emosional, tetapi didasarkan pada rasionalitas para pembuat keputusan. Berpedoman pada strategi para pembuat kebijakan berusaha mencapai kepentingan nasional dan mencegah timbulnya hambatan-hambatan atas kepentingan tersebut.¹⁶ kemudian konsep keamanan

¹² Ambo Tuwo, "Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan terhadap Keutuhan ASEAN dan Ketahanan Nasional Indonesia. majalaha TANNAS edisi 96 tahun 2013 hlm.,47

¹³ Frederick L. Schuman dalam P. Anthonius Sitepu “Studi Hubungan Internasional” Graha Ilmu, Yogyakarta.2011 hal. 54

¹⁴ Aditia Maruli “Presiden: Indonesia Waspadaai Situasi Laut China Selatan. 2010 <http://www.antaraneews.com/berita/212862/pr-esiden-indonesia-waspadaai-situasi-laut-china-selatan> di akses pada 3 April 2015

¹⁵ Yudha Kurniawan, "Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan, *Paper* ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II, Bandung, 2011.

¹⁶ Mochtar Mas'ood.1989. Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi (Yogyakarta: Pusat antar Universitas-Studi Sosial UGM) hlm, 90

dipahami sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman yang nyata (*existential threat*).¹⁷ Bagi negara keberlangsungan hidupnya menyangkut masalah bagaimana memproyeksikan kedaulatan dan bagaimana mengembangkan serta mempertahankan identitasnya.¹⁸

Dibutuhkan keterpaduan kebijakan antar semua instrumen kekuatan nasional untuk mengamankan kepentingan nasional. Dalam konteks menghadapi sengketa Laut Cina Selatan, instrumen diplomasi dan instrument pertahanan Indonesia secara teoritis harus menempuh satu langkah yang terpadu. Eksistensi instrumen pertahanan di antaranya adalah untuk mendukung diplomasi, termasuk apabila diplomasi itu dianggap gagal. Upaya-upaya Indonesia di bidang diplomasi yang di antara berfokus pada penanganan isu sengketa Laut Cina Selatan dalam bingkai ASEAN semestinya didukung pula oleh instrumen pertahanan.

Meningkatnya Kapabilitas Militer Indonesia melalui MEF (Minimum Essential Force) dan Keamanan di Natuna

Apabila tidak ada solusi yang tepat baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam konflik Laut Cina Selatan akan berdampak terhadap ketahanan Nasional. Mengacu pada Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dinyatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan

sistem pertahanan negara.¹⁹ Terkait dengan hal tersebut, sejak 2008 Presiden telah mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara, di mana yang terakhir adalah Peraturan Presiden No.41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah pencapaian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/ MEF*), pemberdayaan industri pertahanan nasional, pencegahan gangguan keamanan masyarakat, modernisasi deteksi dini keamanan nasional dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional. Baik Kebijakan Umum Pertahanan Negara maupun Strategi Pertahanan Negara selanjutnya diterjemahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Sesuai dengan Postur Pertahanan 2010-2029 yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan, pembangunan kekuatan pertahanan pada periode 2010-2024 diarahkan untuk memenuhi *minimum essential force* (MEF).

Tabel.I Modernisasi ALUTSISTA TNI AL

No	Nama Materil	Jumlah	Alokasi
1	a. MLM KRI Klas Korvet Tahap I (KRI FATAHILAH) b. MLM KRI Klas Korvet Tahap II (KRI MALAHATI)	2 unit	US\$ 100.000.000
2	Kapal Bantu HIDRO OCEANOGRAPHY	2 unit	US\$ 93. 892.334
3	Kapal Layar Latih (Pengganti Dewa Ruci)	1 unit	US\$ 71.560.000
4	CN 235 MPA	2 unit	US\$ 59.878.455

¹⁷ Barry buzan, dkk . 2009 . “*Security: A New Framework for Analysis* dalam Genewati Wuryandari dkk. “Keamanan di Perbatasan Indonesia – Timur Leste, Sumber Ancaman & Kebijakan Pengelolaannya” Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm.27

¹⁸ Genewati Wuryandari. ,*ibid.*, hlm 30

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

5	Heli AKS & Suku Cadang	11 unit	US\$ 77.000.000
6	TANK Amphibi BMP-3F	37 unit	US\$ 114.000.000
7	Panser Amphibi BTR 4	5 unit	US\$ 7.000.000
8	Multi Launcher Rocket Sistem (MLRS) KAL 122 MM (Kendaraan Peluncur & Roket)	3 unit	US\$ 27.000.000
9	Mutlirole Light Fregates (MLRS)	3 unit	US\$ 385.000.000
10	Kapal Angku TANK 1&2 (PDN TA. 2011)	2 unit	RP. 319.093.598.000
11	Kapal Angkut TANK (PDN TA. 2012)	1 unit	Rp. 163.353.009.413

(Sumber: Menyambut Kedatangan Alutsista TNI 2014 <http://arc.web.id/artikel/603-menyambut-kedatangan-alutsista-2014.html> diakses pada 18 maret 2015

Tabel.II Modernisasi Alutsista TNI AU

N o	Nama Materil	Jum-lah	Alokasi
1	Pesawat Pengganti MK 53 & DUK (T-501 LIFT)	16 unit	US\$ 399.999.999
2	SU-30 MK-2 & DUK	6 unit	US\$ 470.000.000
3	Heli Full Combat SAR Mission & DUK (EC-725)	6 unit	EUR 155.557.293,97
4	Pesawat Pengganti F-27 & DUK (CN-295)	9 unit	EUR 252.780.580,45
5	Penangkis Serangan Udara (PSU)	6 unit	CHF 140.250.000
6	Heli NAS 332 (PDN TA. 2011-2013)	3 unit	Rp. 170.125.341.038,18
7	Pesawat CN 235 MPA (PDN TA. 2012-2014)	1 unit	RP. 317.271.227.360,-
8	Pesawat C 212-200 (RM TA. 2012)	1 unit	Rp. 52.614.467.000,-
9	Upgrade Hibah	24	US\$

	Pesawat F-16 EDA	unit	670.668.090
10	Pengadaan Pesawat Hercules	5 unit	Rp. 906.000.000.000
11	Hibah Hercules C-130 dari RAAF	4 unit	US\$ 63.000.000

(Sumber: Menyambut Kedatangan Alutsista TNI 2014 <http://arc.web.id/artikel/603-menyambut-kedatangan-alutsista-2014.html> diakses pada 18 maret 2015).

Tabel.III Modernisasi Alutsista TNI AD

N o	Nama Materil	Ju m-lah	Alokasi
1	Heli Angkut (BELL-412 EP)	6 unit	US\$ 64.980.000
2	Heli Serbu Beserta Senjata & Munisi (BELL 412-EP)	16 unit	US\$ 169.999.760
3	Heli Serang Beserta Senjata & Munisi (FENNEX)	12 unit	EUR 74.318.743,28
4	Me Armed 155 MM HOWITZER (CAESAR)	37 unit	EUR 115.344.990
5	ROCKET MLRS	38 unit	US\$ 404.974.860
6	Ranpur Main Battle TANK	180 unit	US\$ 216.102.000
7	Rudal ARHANUD (SHORAD MISSILE)	111 unit	US\$ 140.000.000
8	Rudal ARHANUD (V-SHOKAD MISSILE) MISTRAL	136 unit	EUR 74.222.956.230
9	Panser APS-2/PINDAD (PDN TA. 2010)	11 unit	Rp. 90.000.000.000
10	Panser APS-2/PINDAD (PDN TA. 2013)	14 unit	Rp. 100.000.000.000
11	RETROFIT AMX-13 (PDN TA. 2013)	13 unit	Rp. 97.500.000.000
12	Panser APS-2/PINDAD (RM.	30 unit	RP. 240.000.00

	TA 2012)		0.000
13	Panser APS-2/PINDAD (RM TA. 2013	24 unit	Rp. 215.921.667.000
14	Heli Serang Apache AH-64E	8 unit	US\$ 632.000.000

(Sumber: Menyambut Kedatangan Alutsista TNI 2014 <http://arc.web.id/artikel/603-menyambut-kedatangan-alutsista-2014.html> diakses pada 18 maret 2015).

Semenjak tahun 2004 pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memodernisasi militer Indonesia. Sebelumnya kondisi militer Indonesia sangatlah memprihatinkan karena kebanyakan alutsista yang dimiliki TNI sudah dalam kondisi tua, dan keadaan diperparah dengan adanya embargo dari Amerika Serikat dan sekutunya sepanjang tahun 1999-2005, membuat banyak Alutsista TNI yang mangkrak karena kekurangan suku cadang. Saat ini, untuk di kawasan Asia Tenggara kapabilitas Militer Indonesia menduduki urutan keempat, setelah Vietnam, Singapura dan Thailand.²⁰

Namun, Peringkat kepemilikan alutsista tidak otomatis menentukan perbandingan kekuatan militer. Sebuah lembaga analisis data mengenai kekuatan militer dunia Global Fire Power, menyusun peringkat kekuatan militer tidak hanya pada kapabilitas militer, tapi berdasarkan lebih lima puluh faktor yang berbeda, seperti: potensi keputusan perang konvensional masing-masing negara berdasarkan kemampuan darat, laut dan udara, kemudian jumlah personil, sumber daya alam, keuangan, geografi, jumlah populasi, jumlah konsumsi minyak dan lain-lain.²¹ Berdasarkan Nilai Indeks Kekuatan Militer tersebut, pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke

12 negara terkuat di di dunia berada satu peringkat lebih baik dari Australia yang berada di peringkat 13. Peringkat 1 sampai 11 adalah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, Inggris, Perancis, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Turki, Israel.²²

Selain meningkatkan kapabilitas Alutsista, TNI juga meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan terutama di Natuna dengan menambah jumlah pasukan dan juga armada tempur, berikut data kekuatan TNI di kepulauan Natuna:

1. Membangun Pangkalan Sukhoi Su-27
2. Siagakan 4 Helikopter AH-64E Apache
3. Menambah 1 Batalion Infantri dari Kodam Bukit Barisan
4. Patroli Skuadron Jet Pekanbaru
5. Menambah Puluhan Kapal dari Armabar TNI AL

Dengan adanya kekuatan TNI di Natuna tentu bisa menjadi alarm bagi Indonesia terhadap ancaman yang datang dari ketegangan Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia sendiri tampaknya meyakini betul potensi ancaman besar bagi kedaulatan Indonesia khususnya sekitar kawasan Kepulauan Natuna terkait memanasnya konflik Laut Cina Selatan. Penempatan pasukan yang didukung oleh fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan, agar keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.

Meningkatkan Diplomasi Preventif Dengan Negara- Negara Pengkalim Untuk Meredam Konflik

Sebagai negara yang netral dan memiliki kebijakan politik luar negeri yang “bebas aktif”, Indonesia memahami kerumitan dari konflik Laut Cina Selatan. Upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah melalui jalur diplomasi, yakni diplomasi

²⁰ Kampus Milier <http://kampusmiliter.com/> diakses paada 20 April 2015

²¹ <http://www.globalfirepower.com/> 23 April 2015

²² <http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp> 23 April 2015

preventif. S.L. Roy menjelaskan diplomasi preventif cenderung lebih banyak dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga. Diplomasi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang berpotensi hingga perang senjata.²³

Paling tidak ada 5 forum pertemuan penting yang membahas masalah sengketa di Laut Cina Selatan, dimana Indonesia memiliki peran yang signifikan. Terutama ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2011. Kelima Forum tersebut adalah :

- A. *The 20th Anniversary of the Workshop Managing Potential Conflicts in the South China Sea*, 1- 3 November 2010
- B. *The Six's ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)*, 17-19 April 2011
- C. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 dan ke-19 ASEAN tahun 2011
- D. Pertemuan ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference/ ASEAN Regional Forum 44th AMM/PMC/18th ARF pada tahun 2011
- E. Diplomasi Bilateral Indonesia dengan negara pengklaim Laut Cina Selatan pada tahun 2012

Pada masa menjadi ketua ASEAN tahun 2011, Indonesia berusaha menggunakan momentum sepuluh tahun pembahasan deklarasi etik tentang laut Cina Selatan (DOC) pada tahun 2012 menjadi kekuatan hukum yang mengikat yakni *code of conduct* (COC). Indonesia dan juga ASEAN menekankan implementasi efektif dari DOC diterapkan dalam bentuk COC.

Diplomasi preventif dalam menyelesaikan konflik cukup berpengaruh terhadap adanya kesadaran negara-negara untuk tidak memperburuk keadaan. Konfrontasi senjata dan aktifitas militerisasi hanya meningkatkan ketegangan di wilayah konflik. Sebagai negara yang berperan besar dalam penyelesaian konflik di kawasan laut Cina Selatan, partisipasi Indonesia diakui oleh dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk terus aktif mencari jalan konsolidasi dan menyerukan arti penting kawasan Laut Cina Selatan turut juga dirasakan oleh dunia internasional.

Meningkatkan Manajemen Perbatasan dan Aktifitas di Perairan Natuna dengan cara Eksplorasi Minyak di Laut Natuna

Masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara (*sovereignty*), termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Pentingnya manajemen pengelolaan perbatasan negara Indonesia. Salah satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan perbatasan (*diplomacy border*) agar terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, serta melakukan aktifitas eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna, sebagai bentuk eksistensi Indonesia di wilayah tersebut.

Perundingan perbatasan Indonesia- Vietnam Dari tahun 2010 sampai 2012 Perundingan Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI – Vietnam telah dilaksanakan 4

²³ S.L Roy. 1991Diplomasi. Rajawali Pers. Jakarta. hlm., 163

(empat) kali perundingan²⁴ Hingga perundingan ke - 4, kedua pihak masih memiliki perbedaan dalam usulan garis batas ZEE dan pandangan dalam pembahasan *principles and guidelines* penarikan garis batas ZEE di Laut China Selatan khususnya dalam kerjasama perikanan dan pertukaran titik dasar dan garis pangkal serta kegiatan *Coordinated Patrol*.

Perundingan perbatasan Indoensia Malaysia di tahun 2010 dalam perundingan penetapan delimitasi batas maritim, telah melanjutkan proses perundingan untuk membahas segmen-segmen yang meliputi Selat Malaka, Selat Singapura, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi.²⁵ Pada tahun 2012 kepanjangan garis *Provisional Territorial Sea Boundary* (PTSB) belum ada kesepakatan, adapun hasil keputusan yang lain adalah Indonesia masih mempertahankan klaim batas ZEE di Selat Malaka bagian Selatan dan klaim batas laut teritorial di Selat Singapura bagian Timur (bagian Utara P. Bintan), yang masih belum sesuai dengan klaim Malaysia.²⁶

Perbatasan Indonesia-Tiongkok di laut Cina Selatan, secara sepihak pada 2009 Tiongkok menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Terkait klaim tersebut Secara resmi tahun 2010 Indonesia mengirimkan surat keputusan kepada PBB agar pihak Tiongkok memberikan penjelasan apa latar belakang, hukum apa yang mereka gunakan. Meskipun

hingga sekarang belum ada jawaban resmi dari Tiongkok,²⁷ Indonesia tetap mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan antar negara terutama masalah wilayah perbatasan.

Eksplorasi Minyak di perairan Natuna

Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi pasokan energi yang terus meningkat. Untuk itu Indonesia terus melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber energi yang ada. Selama ini wilayah ZEE Indonesia menyimpan kekayaan terbesar dan merupakan penyumbang kas negara. Salah satu ZEE Indonesia yang sekaligus merupakan cadangan minyak dan gas alam terbesar Indonesia berada di Laut Natuna.

Menurut hitungan pemerintah, Ladang gas D-Alpha yang dikenal dengan Blok East Natuna terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 *trillion cubic feet* (TCF) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCF merupakan salah satu sumber terbesar di Asia Pasifik dan tiga kali dari kandungan gas Arun, Aceh.²⁸ Adapun, Blok Natuna Sea A merupakan wilayah kerja gas yang terletak di Laut Natuna Barat, berdekatan dengan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Produksi saat ini sekitar 145 MMscfd dari Lapangan Anoa, 75 MMscfd dari Gajah Baru dan 2.350 barel per hari minyak. Total cadangan terbukti dan potensi cadangan (2P)

²⁴KEMENHAN

<http://strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf> 6 April 2015

²⁵ Kementerian Luar Negeri Indonesia "Buku Diplomasi Indonesia tahun 2011. Hal 109 di unduh dari

<http://www.kemlu.go.id/Books/DIPLOMASI%202011.pdf> diakses pada 26 maret 2015

²⁶<http://strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf> diakses pada 4 April 2015

²⁷ Panca Hari Prabowo "Indonesia pernah Sampaikan Keberatan atas Peta Natuna <http://www.antaranews.com/berita/424961/indonesia-pernah-sampaikan-keberatan-atas-peta-natuna> diakses pada 7 April 2015

²⁸ Kusairi & Budi R. Minula "berebut ladang Migas kelas dunia di Natuna di unduh dari http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=117&type=7#.VRjAz_yUd0s diakses pada 27 Maret 2015

diperkirakan sebesar 209 juta barel setara minyak.²⁹

Salah satu usaha yang dilakukan Indonesia adalah terus melakukan workshop dan lelang tender pengelolaan sumber-sumber minyak Indonesia. Pada tahun 2010 ditanda tangani KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk wilayah kerja dan nama penandatangan lelang reguler tahap I yakni South Sokang di Laut Natuna, konsorsium Lundin South Sokang BV dan Salamancer Energy (South Sokang) Limited. Kemudian Sokang di Laut Natuna, Black Platinum Investment Limited.³⁰ Kemudian Pemerintah mengumumkan hasil Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2012. Perusahaan yang memenangkan Lelang tersebut adalah PT. Equator Energy, wilayah kerja Migas Sokang Offshore, Natuna Timur.³¹

Pada tahun 2013 telah dimulai eksplorasi pertambangan minyak di Natuna.³² Dengan adanya aktifitas langsung dari Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam mengklaim daerah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut Natuna.

Eksistensi Indonesia di laut Natuna akan berdampak terhadap ekonomi nasional dan terjaganya keutuhan wilayah dari gangguan dan klaim negara-negara tetangga.

Simpulan

Pandangan kaum realis terhadap keamanan internasional adalah pesimis, oleh karena itu kaum realis menjaga dan mempertahankan keamanan nasional menjadi prioritas utama pemerintah untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan bernegara dan penduduknya. Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara memang tidak terlibat secara langsung di dalam sengketa perebutan wilayah di Laut Cina Selatan. Akan tetapi, kawasan Laut Cina Selatan merupakan lahan strategis bagi Indonesia. Apabila stabilitas di kawasan tersebut terganggu maka akan berdampak terhadap terhadap keamanan, dan terganggunya kepentingan Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Untuk itu Indonesia langkah-langkah yang kongkret dalam bentuk strategi-strategi dan kebijakan yang untuk mempertahankan kepentingan Indonesia di laut Cina Selatan, serta menjaga stabilitas keamanan tetap terjaga.

²⁹ Pertamina dan PTTEP Akuisisi Anak Usaha HESS di Indonesia. 2013, di unduh dari <http://www.pertamina.com/news-room/siaran-pers/pertamina-dan-pttep-akuisisi-anak-usaha-hess-di-indonesia/> di akses pada 30 Maret 2015

³⁰ Pemerintah KKKS mulai kerjasama Produksi Migas bumi <http://economy.okezone.com/read/2010/12/17/320/404412/320/pemerintah-kkks-mulai-kerja-sama-produksi-minyak-gas-bumi> di akses pada 28 Maret 2015

³¹ ESDM <http://esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5933-pengumuman-pemenang-lelang-wk-migas-tahap-i-2012.html> diakses pada 24 Maret 2015

³² 3 KKKS Eksplorasi Sumur Migas Di Natuna <http://www.haluankepri.com/natuna/54803-3-kkks-eksplorasi-sumur-migas-di-natuna.html> diakses pada 6 April 2015

Daftar Pustaka

Jurnal

Hock, Saw Swee-, Sheng Lijun, dan Chin Kin Wah (eds.), 2005. ASEAN-China Relations: Realities and Prospects (Singapura: ISEAS Publishing)

Kurnia, Erwin N.M. 2014 "Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Sistem Pertahanan Negara Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta, di unduh dari https://www.academia.edu/7289711/Pengaruh_Konflik_Laut_China_Selatan_Terhadap_Sistem_Pertahanan_Negara diakses pada tanggal 2 Desember 2014.

Kurniawan, Yudha, 2011. "Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan, *Paper* ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II, Bandung

Muhamad, Simela Victor. 2012. "Kepentingan China dan Posisi Asean dalam Sengketa laut China Selatan". Jurnal info Singkat Hub. Internasional vol. IV, No 08/II/P3DI/April.

Tuwo, Ambo. 2013. "Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan terhadap Keutuhan ASEAN dan Ketahanan Nasional Indonesia. majalah TANNAS edisi 96 tahun

Buku

Mas'oed, Mochtar. 1989. Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi (Yogyakarta: Pusat antar Universitas-Studi Sosial UGM).

Roy, S.L. 1991. Diplomasi. Rajawali Pers. Jakarta.

Roza, Rizki Poltak Partogi N., Simela V.M. 2013 "Konflik Laut China Selatan dan

Implikasinya terhadap Kawasan" P3DI Setjen DPR Republik Indonesiadan Azza Grafika. Jakarta.

Sitepu, P. Anthonius "Studi Hubungan Internasional" Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011

Wuryandari, Genewati dkk. 2009 "Keamanan di Perbatasan Indonesia – Timur Leste, Sumber Ancaman & Kebijakan Pengelolaannya" Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dokumen Resmi

Kementrian Luar Negeri Indonesia "Buku Diplomasi Indonesia tahun 2011. di unduh dari <http://www.kemlu.go.id/Books/DIPLOMASI%202011.pdf> diakses pada 26 maret 2015

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/ PRES.KAB/ 6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Jakarta

Artikel/ Website

Aditia Maruli "Presiden: Indonesia Waspada Situasi Laut China Selatan. 2010 <http://www.antaranews.com/berita/212862/presiden-indonesia-waspada-situasi-laut-china-selatan> di akses pada 3 April 2015

Dinamika di Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap Indonesia" diakses dari <http://www.fkpmaritim.org/dinamika-di-laut-cina-selatan-dan-implikasinya-terhadap-indonesia/> diunduh pada 10 Desember 2014

- EIA
<http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS>
 diakses pada 6 April 2015
- ESDM <http://esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5933-pengumuman-pemenang-lelang-wk-migas-tahap-i-2012.html> diakses pada 24 Maret 2015
- Global Fire Power
<http://www.globalfirepower.com/> diakses pada 23 April 2015
- Global Fire Power
<http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp> diakses pada 23 April 2015
- Kampus Milier
<http://kampusmiliter.com/>
 diakses pada 20 April 2015
- KEMENHAN
<http://strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf> 6 April 2015
- KKKS Eksplorasi Sumur Migas Di Natuna
<http://www.haluankepri.com/natuna/54803-3-kkks-eksplorasi-sumur-migas-di-natuna.html> diakses pada 6 April 2015
- Kusairi & Budi R. Minula "berebut ladang Migas kelas dunia di Natuna di unduh dari
http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=117&type=7#.VRjAz_yUd0s diakses pada 27 Maret 2015
- Menyambut Kedatangan Alutsista TNI 2014
<http://arc.web.id/artikel/603-menyambut-kedatangan-alutsista-2014.html> diakses pada 18 maret 2015
- Panca Hari Prabowo “ Indonesia pernah Sampaikan Keberatan atas Peta Natuna
<http://www.antaraneews.com/be-rita/424961/indonesia-pernah-sampaikan-keberatan-atas-peta-natuna> diakses pada 7 April 2015
- Pemerintah KKKS mulai kerjasama Produksi Migas bumi
<http://economy.okezone.com/read/2010/12/17/320/404412/320/pemerintah-kkks-mulai-kerja-sama-produksi-minyak-gas-bumi> diakses pada 28 Maret 2105.
- Pertamina dan PTTEP Akuisisi Anak Usaha HESS di Indonesia. 2013, di unduh dari
<http://www.pertamina.com/news-room/siaran-pers/pertamina-dan-pttep-akuisisi-anak-usaha-hess-di-indonesia/> di akses pada 30 Maret 2015
- Singapura Desak Cina Jelaskan Klaim
<http://internasional.kompas.com/read/2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.Cina.Jelaskan.Klaim> Diakses tanggal 27 November 2014